



PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT

Bandung, 23 Agustus 2021

DASAR HUKUM PELAKSANAAN RB

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang **Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025**

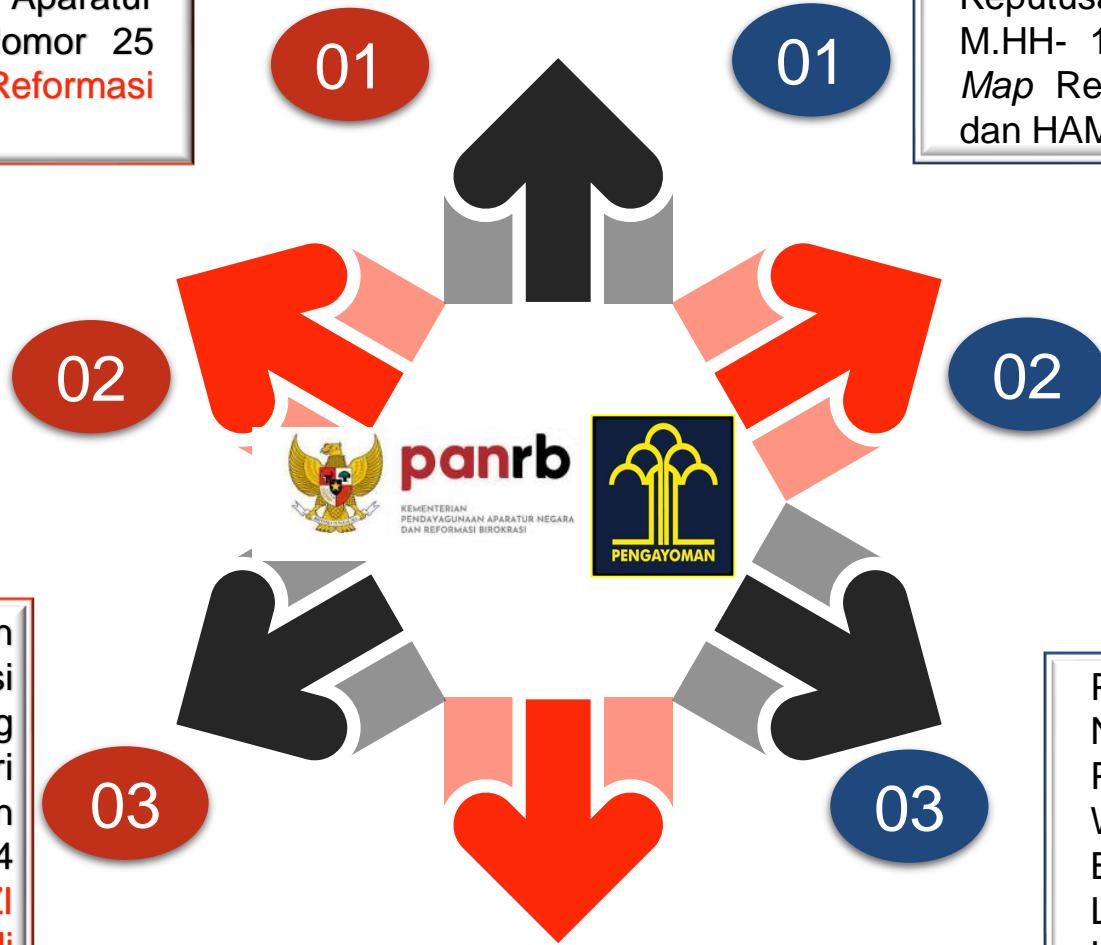
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang **Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 10 Th 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Th 2014 tentang **Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah**

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 19.0T.03.01 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024*

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH- 01.OT.03.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

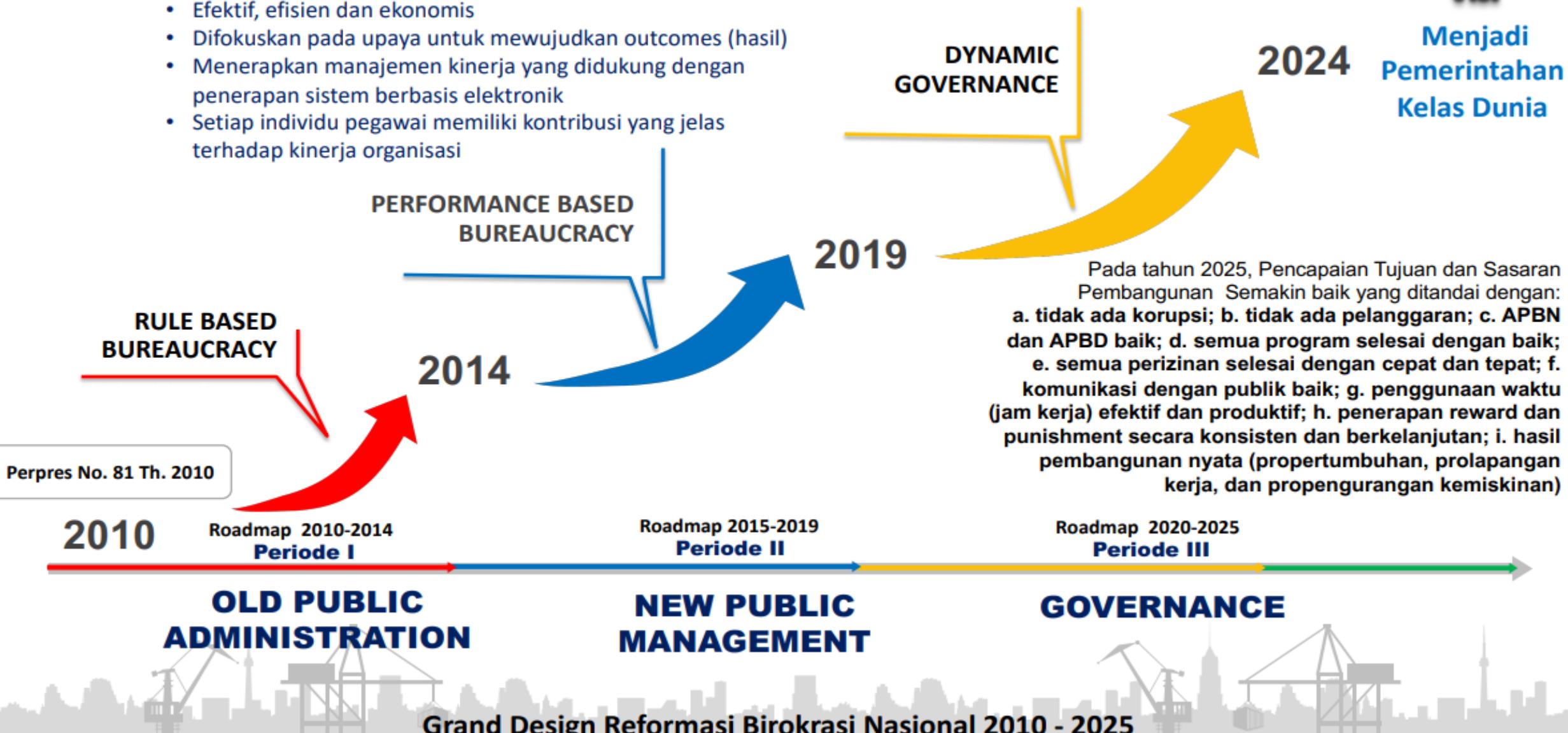




GRAND DESIGN RB TAHUN 2010-2025

- Efektif, efisien dan ekonomis
- Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
- Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

Visi
Menjadi
Pemerintahan
Kelas Dunia

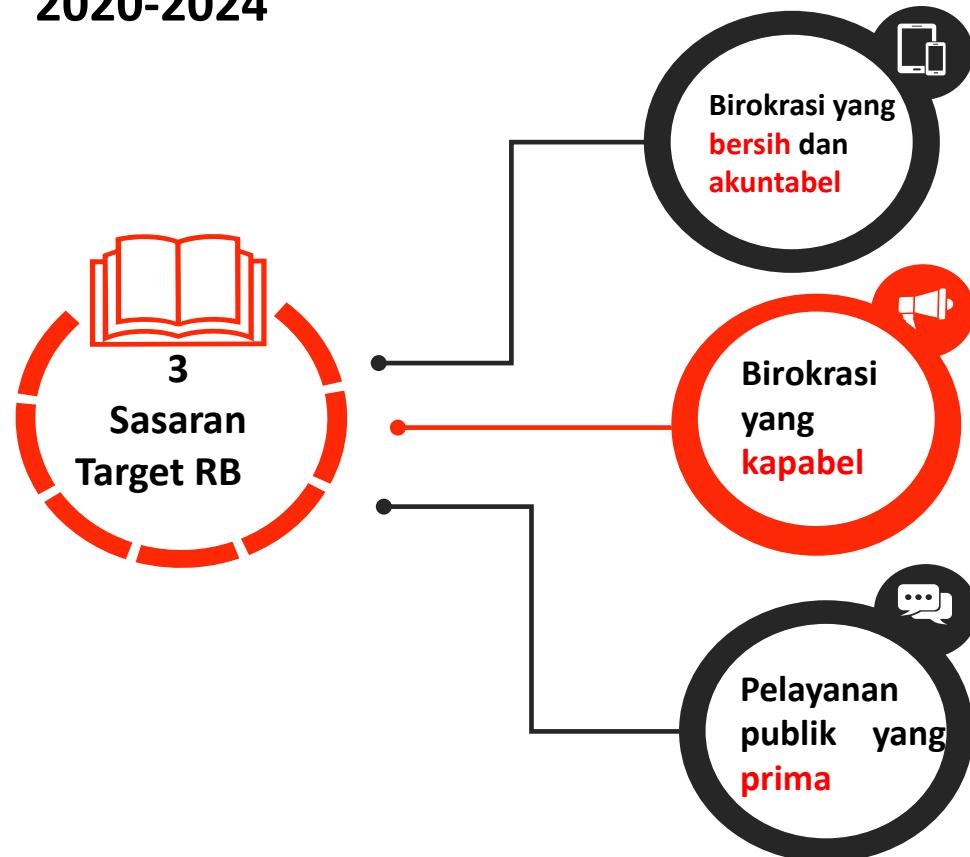




ROAD MAP REFORMASI BIOKRASI NASIONAL

TAHUN 2020-2024

Permen PAN-RB No 25 Th 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi
2020-2024



PELAKSANAAN RB DIBAGI DALAM 2 TINGKATAN

01 TINGKAT NASIONAL

- a. **Makro** : Penetapan arah kebijakan RB secara nasional serta monev RB tingkat meso dan mikro.
- b. **Meso** : Pelaksanaan program RB **oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading sector**. Seluruh instansi yang melaksanakan program pada level meso tergabung dalam Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

1. Kapabilitas APIP
2. Maturitas SPIP
3. Kualitas PBJ
4. Pengawasan Kearsipan
5. Profesionalitas ASN
6. Merit System
7. Pengelolaan Keuangan
8. Pengelolaan Aset
9. Indeks Perencanaan
10. Kepatuhan Pelayanan Publik
11. **INDEKS REFORMASI HUKUM**
12. Indeks Kualitas Kebijakan
13. Indeks SPBE
14. Indeks Kelembagaan
15. Indeks Tata Kelola Manajemen SDM
16. Indeks Kepemimpinan Perubahan
17. Indeks Pelayanan Publik
18. Indeks Pemerintahan Daerah

02 INSTANSIONAL/MIKRO

Implementasi RB pada masing-masing instansi.



ROAD MAP REFORMASI BIOKRASI KEMENKUMHAM TAHUN 2020-2024

Implementasi RB Tingkat Instansional/Mikro

Kepmenkumham Nomor:
M.HH-19.OT.03.01 Tahun
2020 tentang *Road Map*
RB Kementerian Hukum
dan HAM Tahun 2020-2024



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ADALAH INSTRUMEN DALAM
PENCAPAIAN IMPLEMENTASI **ROAD MAP**
SELAMA 5 TAHUN, YANG TERDIRI DARI
DELAPAN AREA PERUBAHAN :

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. DEREGULASI KEBIJAKAN
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
4. PENATAAN TATA LAKSANA
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
6. PENGUATAN PENGAWASAN
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



AKSELERASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



8 Area Perubahan:

1. Manajemen Perubahan
2. **Deregulasi Kebijakan**
3. **Penataan dan Penguatan Organisasi**
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



6 Area Perubahan:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



- a. PMPRB adalah model penilaian mandiri yang **berbasis prinsip Total Quality Management** dan digunakan sebagai metode untuk melakukan **penilaian serta analisis** yang menyeluruh terhadap **kinerja instansi pemerintah**
 - b. Pelaksana : Unit Eselon I
 - c. Hasil Penilaian : Indeks RB Kementerian
 - d. Area Perubahan : 8
-
- a. PMPZI adalah **Predikat** yang diberikan kepada instansi pemerintah yang **pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
 - b. Pelaksana : Seluruh Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM (Es I, Kanwil dan UPT)
 - c. Hasil Penilaian : Predikat WBK/WBBM
 - d. Area Perubahan : 6



Sinovik (**Inovasi Pelaksanaan Pelayanan Publik**) adalah **terobosan** jenis **pelayanan publik baik** yang merupakan gagasan/ide **kreatif orisinal** dan/atau adaptasi/modifikasi yang **memberikan manfaat bagi masyarakat**, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penilaian Messo



8 Area Perubahan

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistim Manajemen Aparatur
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- .

1. Kapabilitas APIP
2. Maturitas SPIP
3. Kualitas PBJ
4. Pengawasan Kearsipan
5. Profesionalisme ASN
6. Merit System
7. Pengelolaan Keuangan
8. Indeks Pengelolaan Asset
9. Indeks Perencanaan
10. Kepatuhan Pelayanan Publik
11. Indeks Reformasi Hukum
12. Indeks Kualitas Kebijakan
13. Indeks SPBE
14. Indeks Kelembagaan
15. Indeks Tata Kelola Manajemen SDM
16. Indeks Kepemimpinan Perubahan
17. Indeks Pelayanan Publik
18. Indeks Pemerintahan Daerah

Instansi Penilai

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Hukum dan HAM
3. Kementerian PAN dan RB
4. BPK
5. BPKP
6. ANRI
7. BKN
8. LAN
9. KASN
10. OMBUDSMAN RI
11. KPK

CAPAIAN KINERJA KEMENKUMHAM



NO	TAHUN	SAKIP	INDEKS RB	MATURITAS SPIP	SMART	IKPA	OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
1.	2017	71,74 (BB)	76,33 (BB)	2,4 (Berkembang)	97,08	86,09	WTP
2.	2018	74,54 (BB)	77,37 (BB)	2,4 (Berkembang)	91,43	92,76	WTP
3.	2019	76,71 (BB)	78,98 (BB)	3,309 (Terdefinisi)	97,80	95,10	WTP
4.	2020	77,29 (BB)	80,01 (A)	3,882 (hasil nilai TPI)	96,75	94,79	WTP

NO	TAHUN	JUMLAH SATKER WBK	JUMLAH SATKER WBBM	JUMLAH SATKER STRANAS PK
1.	2015	1	-	-
2.	2018	10	-	-
3.	2019	34	4	5
4.	2020	72	11	-
5.	2021	Jumlah Satker yang diusulkan WBK/WBBM untuk dinilai oleh TPN sebanyak : 477 satker.		

*Total Satuan Kerja Berpredikat WBK : 107 dan WBBM : 15

NILAI “HASIL ANTARA” MASING-MASING LEADING SECTOR UNTUK KEMENKUMHAM TAHUN 2020



No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	(0 – 100)	85,53 (Memuaskan)	ANRI
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	(0 – 100)	30,00 (Kurang)	LKPP
3.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	(0 – 100)	94,79 (Skor 0-100)	Kementerian Keuangan
4.	Merit System	(0 – 400)	336,50 (Sangat Baik)	KASN
5.	ASN Profesional	(0 – 100)	52,00 (Sangat Rendah)	BKN
6.	Maturitas SPIP	(1 – 5)	3,00 (Terdefinisi)	BPKP
7.	Kapabilitas APIP	(1 – 5)	3,00 (Integrated)	BPKP
8.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	(0 – 100)	90,71 (Zona Hijau)	Ombudsman RI

No.	Hasil Survei	Indeks	
		2019	2020
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (SKALA 4)	3,46	3,70
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi (SKALA 4)	3,72	3,78

SURVEY “EKSTERNAL”
TERHADAP MASYARAKAT
YANG TELAH MERASAKAN
PELAYANAN DI KEMENKUMHAM

Sumber data : Surat MenPANRB
No.B/43/M.RB.06/2021,
Hal : hasil evaluasi pelaksanaan RB Tahun 2020



ESENSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM



PREDIKAT YANG DIBERIKAN
KEPADA INSTANSI PEMERINTAH



PENCEGAHAN
KORUPSI

KOMITMEN SELURUH
JAJARAN



PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

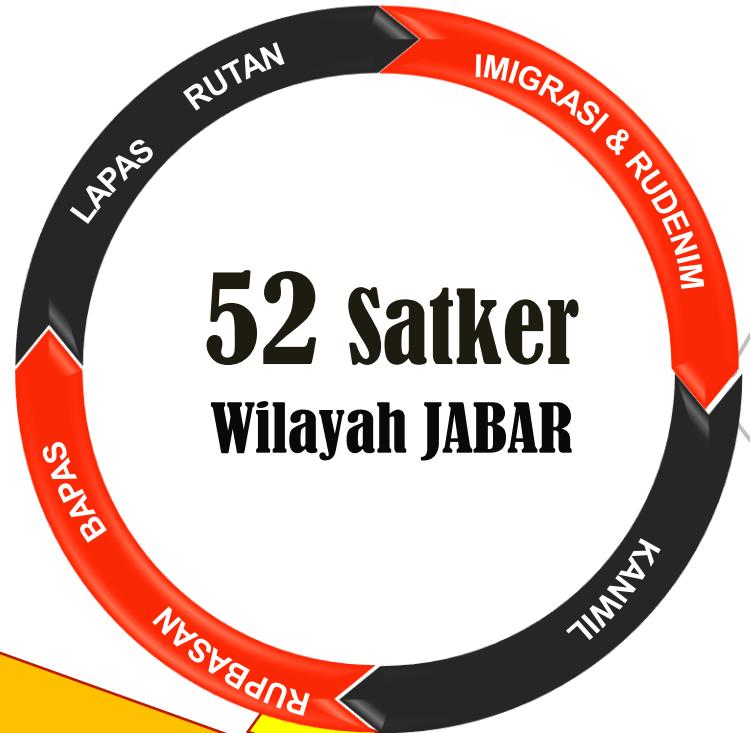


ALWAYS THE BEST





USULAN KANWIL JAWA BARAT MENUJU WBK DAN WBBM TAHUN 2021



48 satker
TELAH dinilai oleh TPI

41 satker
diusulkan dan akan dinilai oleh TPN



12 Satker
menuju WBBM



36 Satker
menuju WBK



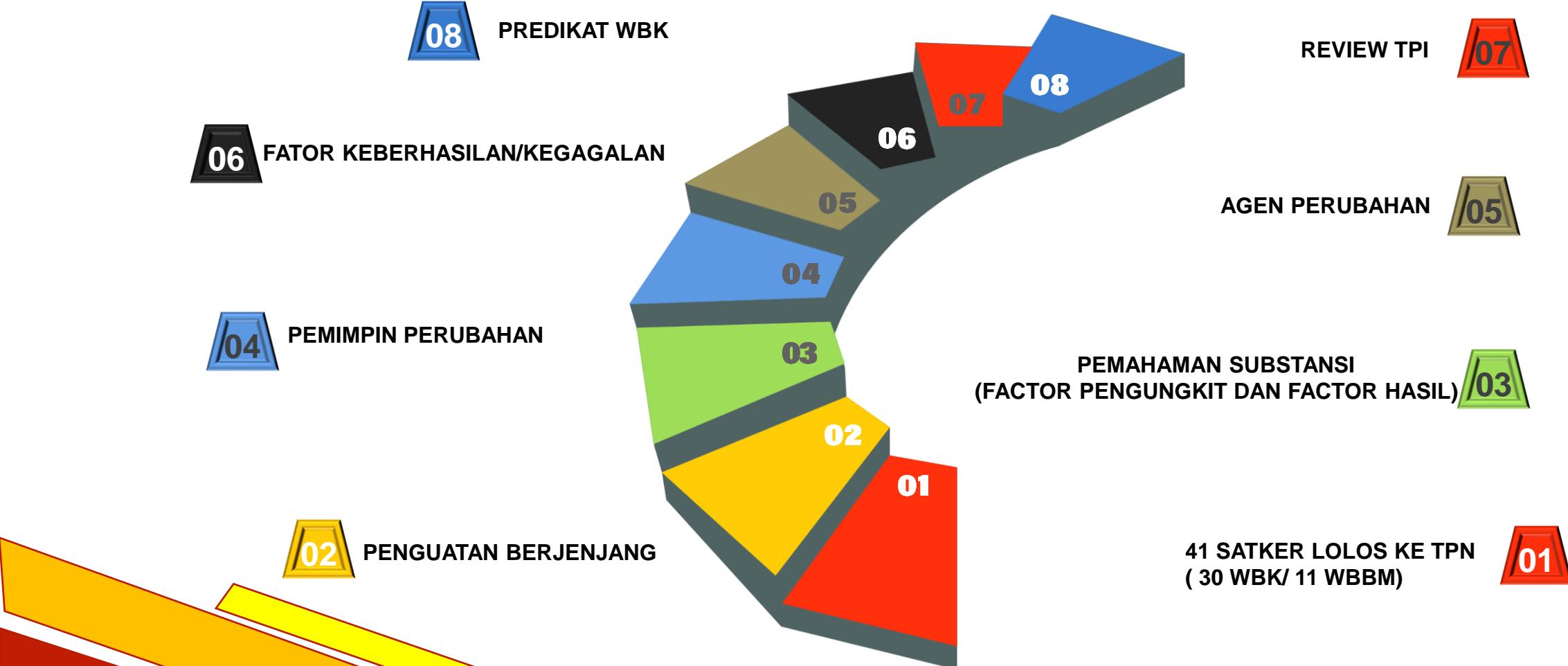
11 Satker
menuju WBBM



30 Satker
menuju WBK

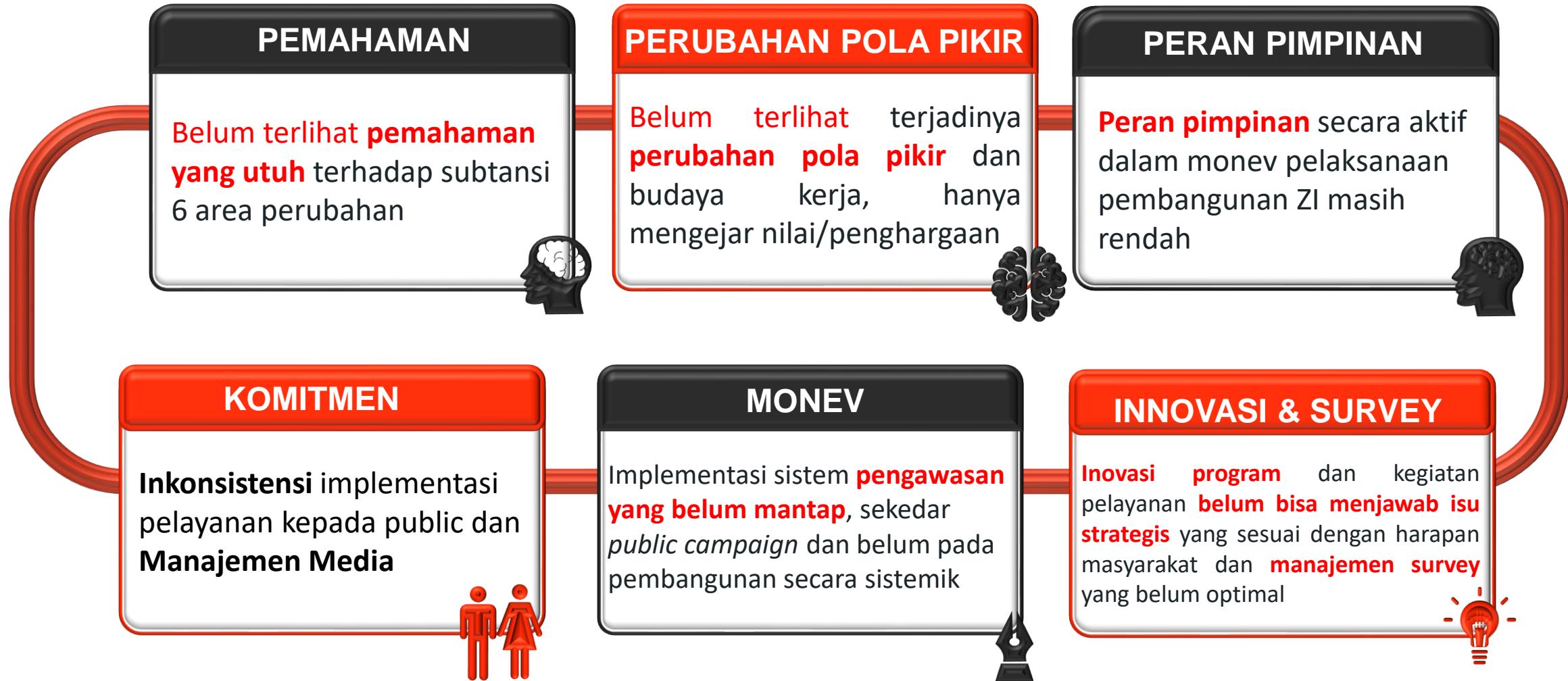


POTENSI RESOURSE





CATATAN HASIL EVALUASI OLEH TIM PENILAI INTERNAL



FAKTOR KEBERHASILAN

Dalam *Desk Evaluation*, Pimpinan dan Tim Kerja dapat **meyakinkan evaluator mengenai perubahan yang telah dilakukan** (*before – after* terlihat jelas)

Komitmen pimpinan dan jajaran sangat terlihat kuat, baik dalam desk evaluation maupun ketika penilaian lapangan

Sarana dan prasarana tertata dengan baik dan **mendukung terciptanya pelayanan yang baik bagi pengguna** (alur jelas, kondisi bersih, nyaman, dll)

Transparansi di UPT berjalan dengan baik, pengguna layanan memperoleh **informasi secara mudah dan jelas**



Proses **Internalisasi ZI** kepada pegawai **telah dilakukan** secara merata dan konsisten

Contoh :

- di Kejaksaan materi ZI dimasukkan dalam latsar CPNS
- Di MA, internalisasi ZI kpd pegawai dan masyarakat melalui pengumuman rutin sebelum sidang

Satker dapat **membuktikan program-program unggulan yang telah dijabarkan** dalam *desk evaluation* dan mindsetnya tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen

Inovasi yang dibuat benar-benar **bermanfaat** terhadap pengguna layanan, bukan sekedar formalitas

Contoh :

Di salah satu UPT, ketika pembesuk selalu taat pada aturan, maka akan diberikan tanda bintang dan reward berupa tambahan jam kunjungan

• Faktor Penggugur / Kegagalan

Sumber

Komitmen pimpinan dan pejabat lainnya diragukan, terlihat dari internalisasi ke anggota yang tidak maksimal sehingga pemahaman kasatker dan jajaran kurang optimal.





“FAKTOR LAIN PENYEBAB KEGAGALAN SATKER DALAM EVALUASI TPI (CATATAN DESK EVALUASI)“



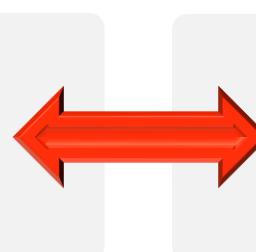
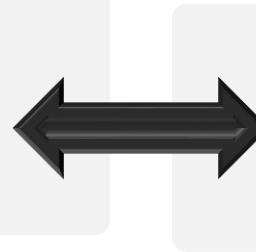
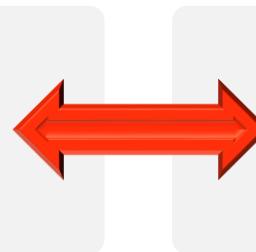
- Kantor Wilayah tidak optimal dalam memberikan pembinaan terhadap satuan kerja dibawahnya sehingga terdapat satuan kerja yang tidak mendapat informasi yang memadai terkait Evaluasi TPI.



- Inovasi yang disajikan oleh satuan kerja menuju WBBM tidak ada perubahan dari inovasi yang disajikan pada saat mendapatkan predikat WBK. sehingga dinilai tidak ada pembaruan inovasi.



- Masih terdapat satker yang tidak dapat membedakan antara Inovasi dengan Pelaksanaan Tusi Satker, sehingga Inovasi yang disajikan adalah merupakan pelaksanaan Tugas dan Fungsi utama.



- Rendahnya komitmen Kepala Satuan kerja dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sehingga tidak melakukan perbaikan dokumen berdasarkan hasil rekomendasi Desk Evaluasi TPI.



- terjadi pergantian Pimpinan (Kepala Satuan Kerja) namun pimpinan yang baru tidak melakukan atau melanjutkan pembangunan Zona Integritas dan tidak ada peningkatan inovasi dari menuju WBK kepada menuju WBBM;



- Masih terdapat Pimpinan satuan kerja berpredikat WBK menuju WBBM yang tidak melakukan proses perubahan menuju WBBM sehingga Inovasi dan perubahan yang disajikan adalah Inovasi dan perubahan yang disajikan pada saat Evaluasi menuju WBK .



PERSIAPAN DESK EVALUASI TPN



- **Memahami kendala** dan cara mengatasinya?
 - membudayakan ZI di Satker
 - Memahami **esensi 6 area perubahan** dalam ZI
-
- **mengatasi praktik pungli** dan gratifikasi, sistem seperti apa yang dibuat oleh satker?
 - langkah strategis untuk memastikan **semua pegawai menerapkan anti korupsi/anti gratifikasi** dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal



- **Implementasi** Perjanjian Kinerja, Target Kinerja, dan mencapai tarja.
 - **Fokus** pada realisasi kinerja, bukan hanya penyerapan anggaran.
 - **Laporan** Kinerja harus menjelaskan realisasi dari target (majoritas satker tidak memiliki kesesuaian dalam mengukur pencapaian tarja).
-
- **layanan yang menyentuh** langsung ke masyarakat
 - **Inovasi** untuk menciptakan pemerintahan bersih dan bebas KKN, serta **meningkatkan layanan publik**

STRATEGI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM



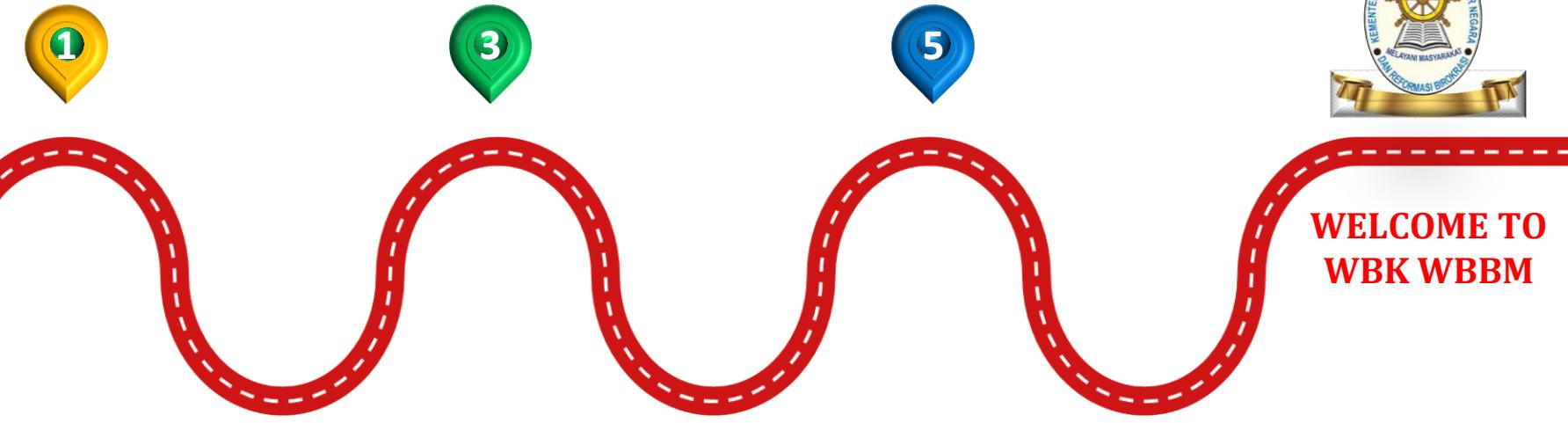
MINDSET / CULTURSET
& KOMITMEN

PROGRAM YANG
MENYENTUH
MASYARAKAT

MANAJEMEN
MEDIA



WELCOME TO
WBK WBBM



KEMUDAHAN,
KECEPATAN, &
TRANSPARANSI

MONITORING
DAN EVALUASI

MENGAPA KEMENKUMHAM PERLU TATA NILAI **PASTI**



01

Masih adanya praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan **masih belum baik**, bersih, dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme

02

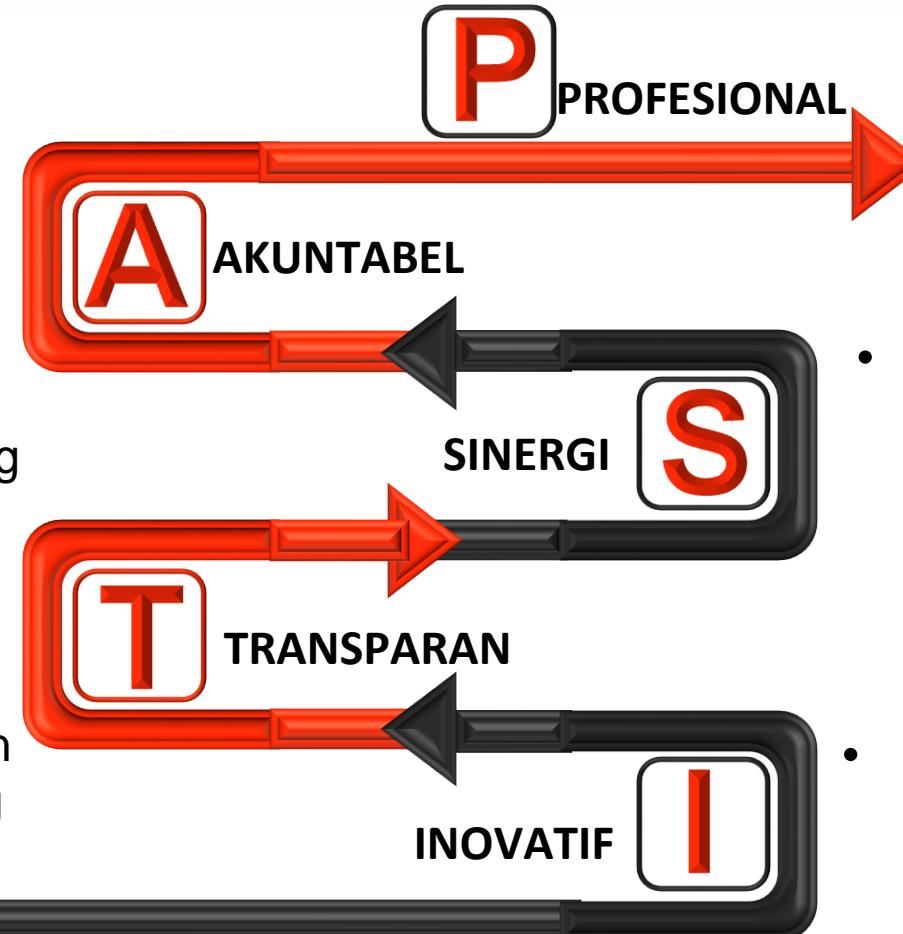
Masih adanya praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan **masih belum baik**, bersih, dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme

03

Masih adanya praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan **masih belum baik**, bersih, dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme

KORELASI TATA NILAI PASTI DENGAN **Zona Integritas**

- Bekerja dengan prinsip kehati-hatian, patuh pada hukum dan etika
- Menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang penyelenggaraan kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai



- Penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi
- Berorientasi pada kepentingan organisasi, berpikir dan bertindak positif, dan menjaga kebersamaan dan kesetaraan
- Berani membuat trobosan dan mau mengembangkan diri ke arah yang lebih maju



Nilai Dasar Setiap ASN : “BerAKHLAK”

Berorientasi Pelayanan:

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
- c. Melakukan perbaikan tiada henti

Kompeten:

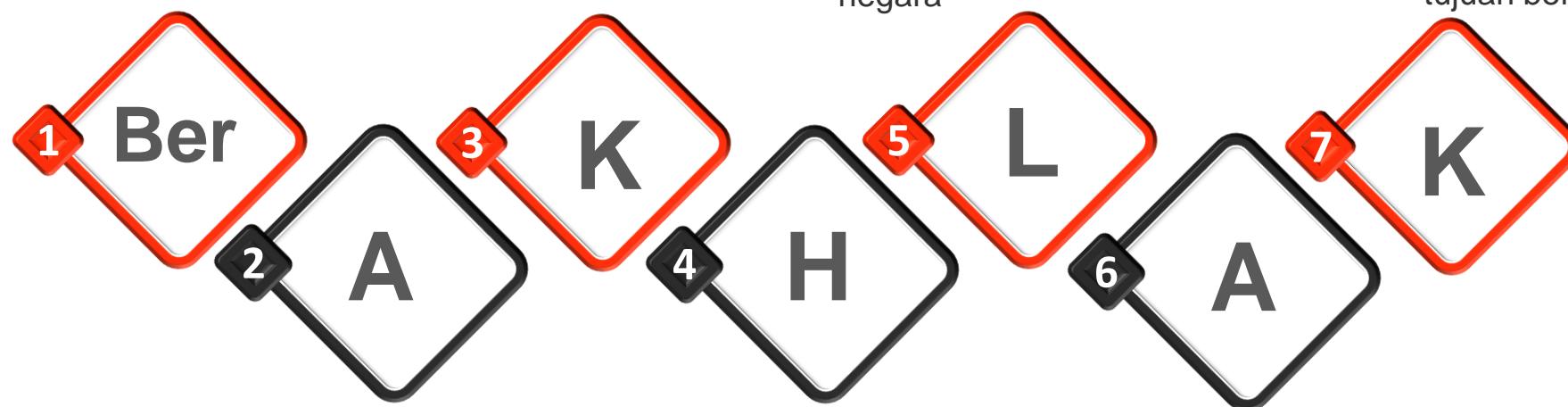
- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- b. Membantu orang lain belajar
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Loyal:

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 45, NKRI, serta Pemerintahan yang sah
- b. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
- c. Menjaga rahasia jabatan dan negara

Kolaboratif:

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- b. Terbuka alam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- c. Menggerakkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama



Akuntabel:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Harmonis:

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- b. Suka menolong orang lain
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

Adaptif:

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- c. Bertindak proaktif



HATUR NUHUN!

Harmoni Dalam Gerak dan Langkah

Any questions ?